UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA REKAMAN LAGU PRODUKSI PT. RATU MUTIARA BUKITTINGGI

Oleh : *Lilian Perdana Sari*

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.

Pembimbing 2 : Dasrol, S.H., M.H.

Alamat : Jln. Ubar 6 Blok A8 No. 10 Perumahan Pandau Permai

Email : Lilian.perdana@yahoo.com- Telepon : 08117687558

ABSTRACT

Lately, many still happened an act detrimental to the copyright belongs to a related company, i.e. the Act of distributing unauthorized creation results that PT. Ratu Mutiara circulating in the form of tapes are not original. Formulation of the problem in this research is whether the cause of the occurrence distribution of unauthorized copyright recordings of song production PT. Ratu Mutiara and how efforts taken in addressing the unauthorized distribution. The purpose of this study: first, to find out the cause of the occurrence distribution of unauthorized recordings of copyrighted songs. Second, to know the efforts taken by the company in addressing the unauthorized distribution.

The type of research that the author use is a kind of sociological legal research. Location of research that became the object of the research is the PT. Ratu Mutiara. located at JL. Adinegoro No.11 Aur Kuning Atas of Bukittinggi, West Sumatra. While the population and sample is the entire parties relating to issues that are examined in this study. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in the study by observation, questionnaire, interview, and the study of librarianship.

From the results of the research there were two basic problems that can be inferred. First, the cause of the still large number of unauthorized distribution took place against the results of the related creation of copyright songs is caused by several factors, namely due to technological developments, price, copyright protection is still lacking was fulfilled, lack of awareness of the perpetrator and the consumer. Second, the effort taken by PT. Ratu Mutiara in addressing the unauthorized distribution is in two ways. The first is a persuasive legal efforts, namely an approach undertaken by the company with the offender not to distribute unauthorized copyrighted property of the company. Second, with the law firm parties i.e. the actions reported to law enforcement. The author's suggestion, first, it is hoped to Department of law and human rights to give guidance in an effort to increase understandings in the field of copyright. The authors also hope that law enforcement can be increasingly assertive and focus in addressing problems of Copyright. Second, expected to law enforcers in determining the rules of the country to consider that to minimize this cheating should sanctions not only charged to sellers, but in order to be charged to the consumer as well.

Keywords: Copyright-Protection Attempts-Unauthorized Distribution

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.¹

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini.² Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia.³

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam

terminologi HKI dikenal istilah "pencipta" dan/atau "penemu".⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pencipta memiliki tiga (3) hak, yaitu meliputi hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, untuk menggunakan nama aliasnya atau samarannya, untuk mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, untuk mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat

---

¹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

²*Ibid.* hlm. 2.

³*Ibid.*

---

⁴Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak terkait yaitu meliputi hak moral Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Produser Fonogram, dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁶ Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁷ Hak atas kekayaan intelektual memiliki peran yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam hubungan ini globalisasi dapat dianalisis dari dua karakteristik dominan. Pertama, era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar negara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang sedemikian itu,

maka kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan mudah diketahui dan segera tersebar ke belahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk menciptakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan bangsa-bangsa.⁸

Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendatipun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu kemampuan penting suatu negara adalah kemampuan dalam penguasaan teknologi.⁹ Mengacu pada hal-hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah semestinya menjadi kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan

---

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

---

⁸Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 1.

⁹*Ibid.*

kemampuan penerapan, pengembangan dan penguasaan teknologi.

Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.¹⁰

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali ada izin untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh si pemegang hak.¹¹ Contohnya seperti pembajakan yaitu penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak perusahaan PT. Ratu Mutiara Bukittinggi, pihak perusahaan tersebut menjelaskan bahwa sampai saat ini masih banyak terjadi pendistribusian tidak sah terhadap rekaman lagu

produksi perusahaan tersebut. Pihak perusahaan menerangkan bahwa terdapat beberapa toko kaset di daerah Pekanbaru yang masih menjual kaset tidak asli Produksi PT. Ratu Mutiara ini. Perkara hak cipta ini tentu sangat berdampak dan merugikan Negara maupun pihak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Upaya Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Rekaman Lagu Produksi PT. Ratu Mutiara Bukittinggi”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab terjadinya pendistribusian tidak sah terhadap hak cipta rekaman lagu produksi PT. Ratu Mutiara?
2. Bagaimanakah upaya yang diambil oleh PT. Ratu Mutiara dalam mengatasi pendistribusian tidak sah terhadap hak cipta rekaman lagu produksi PT. Ratu Mutiara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pendistribusian tidak sah terhadap hak cipta rekaman lagu produksi PT. Ratu Mutiara.
2. Untuk mengetahui cara dan upaya yang diambil oleh

¹⁰Tomi Suryo Utomo, *Loc.cit.*

¹¹Budi Agus Riswandi, *Haki dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 56.

PT. Ratu Mutiara dalam mengatasi pendistribusian tidak sah terhadap hak cipta rekaman lagu produksi PT. Ratu Mutiara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)
  1. Sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah Hak Cipta.
- b. Kegunaan Praktis
  1. Mampu menjadi pedoman bagi siapapun pemilik Hak Cipta Lagu agar mengetahui perlindungan-perlindungan hukum secara pasti yang berhak diterima oleh pemegang Hak Cipta.
  2. Sebagai informasi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pengambilan dan

pendistribusian lagu secara tidak sah, agar tidak merugikan para pemegang Hak Cipta.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹²

Dalam tatanan ekonomi, perlindungan HKI diperlukan untuk melindungi kepentingan para pelaku bisnis dan mereka yang terlibat dalam kegiatan industri dan perdagangan. Lebih dari itu, untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari praktik-praktik dagang yang bersifat curang. Adanya potensi tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat perlu diantisipasi dengan pilar-pilar kebijakan, termasuk pengaturan HKI yang efektif dan memadai.¹³

2. Konsep Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang

---

¹²Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 140.

¹³*Ibid.* hlm. 22.

bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berfikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berfikir, cabang filsafat), karna itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.¹⁴

Tujuan hak cipta adalah insentif bagi produser, penerbit dan promotor yang telah mengambil resiko guna pemasaran dan penjualan karya-karya cipta.¹⁵

---

¹⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9.

¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 196.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan, adalah proses, cara, perbuatan melindungi.¹⁶
2. Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷
3. Rekaman, re.kam.an adalah *nomina (kata benda)* yang direkam (seperti gambar cetakan, lagu, stensil); hasil merekam.¹⁸
4. Lagu, lagu adalah ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya, nyanyi-nyanyian, ragam nyanyi, ragam musik, gamelan dan sebagainya.¹⁹
5. Produksi, pro.duk.si adalah proses mengeluarkan hasil.²⁰
6. PT. Ratu Mutiara Bukittinggi, merupakan perusahaan rekaman yang bergerak di

---

¹⁶ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses tanggal 11 April 2018.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁸ kbbi.kata.web.id/rekaman/, diakses tanggal 11 April 2018.

¹⁹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2010, hlm. 521.

²⁰ <https://kbbi.web.id/produksi>, diakses tanggal 11 April 2018.

bidang industri musik yang berada di Bukittinggi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²¹

Penelitian hukum sosiologis mengkaji aspek hukumnya dengan pelaksanaannya di lapangan dengan cara survey.²² Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui permasalahan mengenai hak cipta terhadap lagu serta upaya dalam melindungi hak-hak cipta yang dimiliki.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian ini adalah PT. Ratu Mutiara yang beralamat di Jl. Adinegoro No. 11 Aur Kuning Atas Bukittinggi, Sumatera Barat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri

atau karakteristik yang sama.²³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- a) Direktur PT. Ratu Mutiara selaku pemegang hak cipta.
- b) Penjual kaset tidak asli produksi PT. Ratu Mutiara Bukittinggi di daerah Pekanbaru selaku pelaku pendistribusian tidak sah produksi PT. Ratu Mutiara.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.²⁴

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.

b. Data Sekunder

---

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 88.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167.

---

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 172.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 91.

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta dan putusan hakim.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan yang berupa buku dan makalah yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) **Bahan hukum tertier**, yaitu bahan penelitian yang diambil dari koran-koran, majalah, berita-berita yang melalui media elektronik serta dari kamus/ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian sosiologis, maka dalam mengumpulkan data atau bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer berupa:

- a) Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan dalam hal pengumpulan data terkait penelitian.
- b) Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar

pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

- c) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti.
- d) Studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang penulis ambil dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap berikutnya adalah tahap mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²⁵

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

²⁵Suratman dan Philips Dillah, *Op.cit*, hlm. 145.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi**
- B. Gambaran Umum PT. Ratu Mutiara Bukittinggi**

PEMBAHASAN

- A. Penyebab Terjadinya Pendistribusian Tidak Sah Terhadap Hak Cipta Rekaman Lagu Produksi PT. Ratu Mutiara.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan dengan pihak pelaku penjual kaset tidak asli ini, bahwa sebab terjadinya pendistribusian tidak sah terhadap hak cipta rekaman lagu ini adalah sebagai berikut:²⁶

1. Perkembangan teknologi, Perkembangan teknologi yang semakin pesat merupakan salah satu penyebab karena mudahnya masyarakat mengakses musik ataupun lagu sehingga masyarakat mudah mengesampingkan kualitas kaset sehingga mau membeli kaset tidak asli dengan harga yang terjangkau atau murah.
2. Harga, dengan perbedaan harga yang signifikan antara kaset asli dan kaset tidak asli menyebabkan ketertarikan konsumen/masyarakat terhadap pembelian kaset dengan mengesampingkan kualitas cenderung ke harga yang lebih murah.
3. Perlindungan terhadap hak cipta yang masih kurang

---

²⁶ Hasil Wawancara dengan Direktur PT. Ratu Mutiara dan Pelaku Penjual Kaset Tidak Asli.

terlaksana. Mengenai perlindungan terhadap hak cipta, Indonesia sudah memiliki aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun dilihat dari maraknya pendistribusian tidak sah ini terlihat bahwa masih kurang sempurnanya pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Cipta

4. Kurangnya kesadaran konsumen ataupun pelaku pendistribusian tidak sah terhadap proses kreatif dan pengorbanan serta usaha yang dilakukan dan dilalui oleh Pencipta, menyebabkan munculnya individu-individu dalam masyarakat yang dengan mudahnya mengesampingkan aturan-aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh Negara.
5. Kurangnya itikad baik dan rasa menjunjung tinggi hasil karya cipta anak bangsa di dalam diri masyarakat.

- B. Upaya yang diambil oleh PT. Ratu Mutiara dalam Mengatasi Pendistribusian Tidak Sah Terhadap Hak Cipta Rekaman Lagu Produksi PT. Ratu Mutiara.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan, pihak perusahaan memberikan keterangan mengenai upaya-upaya yang diambil perusahaan terkait

permasalahan pendistribusian tidak sah ini, yaitu:

1. Upaya perlindungan hak cipta secara persuasif adalah upaya menyampaikan informasi dan interaksi antar manusia dalam kondisi dimana kedua belah pihak bersama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi keduanya. Persuasif merupakan salah satu tindak yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti.²⁷
2. Upaya perlindungan Hak Cipta melalui jalur hukum, upaya hukum ini ditempuh perusahaan dikarenakan kerugian besar yang dialami oleh perusahaan, perusahaan memberikan keterangan bahwa apabila permasalahan ini tidak diselesaikan dengan jalur hukum, pelaku semakin bertindak semena-mena dikarenakan tidak mendapatkan sanksi apapun, dengan semakin maraknya penjualan kaset tidak asli ini mengakibatkan tekanan terhadap penjualan kaset asli

27

<http://ulfahhanaan.blogspot.com/2017/05/teori-upaya-persuasif.html?m=1>, diakses tanggal 26 September 2018.

produksi perusahaan tersebut.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa penyebab masih banyaknya terjadi pendistribusian tidak sah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu perkembangan teknologi, harga, perlindungan terhadap hak cipta yang masih kurang terlaksana, kurangnya kesadaran konsumen dan pelaku pendistribusian tidak sah tentang proses kreatif dan pengorbanan yang dilakukan dan dilalui oleh Pencipta, serta kurangnya itikad baik dan rasa menjunjung tinggi hasil karya cipta anak bangsa di dalam diri masyarakat.
2. Bahwa upaya yang diambil oleh PT. Ratu Mutiara dalam mengatasi pendistribusian tidak sah terhadap hak cipta rekaman lagu produksi PT. Ratu Mutiara adalah dengan dua cara, yaitu:
  - a. Pertama, adalah upaya hukum secara persuasif, yaitu suatu cara pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pelaku untuk tidak menggandakan dan/atau mendistribusikan tidak sah hak cipta milik perusahaan tersebut.

²⁸ Wawancara dengan Direktur PT. Ratu Mutiara tanggal 27 Oktober 2017 di Bukittinggi.

Dengan cara ini perusahaan mengharapkan itikad baik dari penjual.

- b. Kedua, dengan jalur hukum yaitu pihak perusahaan melaporkan tindakan tersebut kepada penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk melakukan penyidikan terkait kecurangan tersebut dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti serta hasil-hasil penelitian yang penulis kemukakan, maka beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah:

1. Diharapkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberi penyuluhan kepada para penjual atau sosialisasi sebagai bentuk pendidikan kepada para penjual tentang Hak Cipta, serta melaksanakan forum seminar dan diskusi dikalangan masyarakat terkait Hak Cipta termasuk perguruan tinggi di berbagai daerah sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat di bidang Hak Cipta serta tindakan meminimalisir faktor-faktor yang memunculkan permasalahan Hak Cipta ini. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran yang tinggi kepada penjual kaset dan masyarakat mengenai Hak Cipta serta memberikan manfaat bagi

pihak pencipta dan pemegang hak cipta

2. Penulis berharap kepada penegak hukum dan petinggi negara yang berwenang dalam menentukan aturan-aturan negara untuk dapat semakin tegas dan fokus dalam menangani permasalahan Hak Cipta ini sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil karya cipta anak bangsa dan dapat mempertimbangkan bahwa untuk meminimalisir kecurangan ini hendaknya sanksi tidak hanya dibebankan kepada penjual saja, namun agar dapat dikenakan kepada konsumen juga, karena dengan berkurangnya konsumen terhadap hasil pendistribusian tidak sah tersebut diharapkan dapat menciptakan negara yang bebas dari tindakan pendistribusian yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *HAK CIPTA Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikmo, 1993,
Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nainggolan, Bernard, 2011,
Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, PT. Alumni, Bandung.
- Riswandi, Budi Agus, 2005,
Haki dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2004,
Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2005,
Hak Kekayaan Intelektual dan budaya hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, OK., 2007,
Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008,
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990,
Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Soelistyo, Henry, 2011,
Hak Cipta Tanpa hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soenandar, Taryana, 1996,
Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiono, 2010,
Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011,
Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2010,
Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014,
Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Syarifin, Pipin, 2004,
Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Utomo, Tomi Suryo, 2010,
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Cheng Lim Saw dan Susanna H. S. Leong, 2008, “Defining criminal liability for primary acts of copyright infringement”, *Journal of Business Law*, Singapore.
- Claire Howell, 2012, “The Hargreaves Review: digital opportunity: a review of intellectual

property and growth”,
Journal of Business Law,
United Kingdom.

Deming Liu, 2017, “Reflections
on the idea/expression
dichotomy in English
copyright law”, *Journal
of Business Law*, United
States.

Jane M. Tatt, 1987, “Authorising
infringement of
copyright”, *Journal of
Business Law*, United
Kingdom.

Rami Olwan, 2016, “The reform
of educational exceptions
in the UAE copyright law
to suit development
goals”, *The WIPO
Journal*, United Arab
Emirates.

Team Pustaka Phoenix, 2010,
*Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Baru*,
Pustaka Phoenix, Jakarta

[http://www.bukittinggikota.go.id/
profil/wilayah](http://www.bukittinggikota.go.id/profil/wilayah), diakses tanggal
16 Mei 2018

[http://bukittinggikota.go.id/index.
php?class=text&file_id=90](http://bukittinggikota.go.id/index.php?class=text&file_id=90),
diakses tanggal 16 Mei 2018

[http://ulfahhanaan.blogspot.com/
2017/05/teori-upaya-
persuasif.html?m=1](http://ulfahhanaan.blogspot.com/2017/05/teori-upaya-persuasif.html?m=1), diakses
tanggal 26 September 2018

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang RI Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 266

D. Website

<https://kbbi.web.id/perlindungan>,
diakses, tanggal 11 April 2018

kbbi.kata.web.id/rekaman/,
diakses, tanggal 11 April 2018

<https://kbbi.web.id/produksi>,
diakses, tanggal 11 April 2018

[http://www.bukittinggikota.go.id/
profil/about](http://www.bukittinggikota.go.id/profil/about), diakses tanggal 16
Mei 2018

[http://bukittinggikota.go.id/profil
/sejarah](http://bukittinggikota.go.id/profil/sejarah), diakses tanggal 16 Mei
2018